

# MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN

FAISAL

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Jalan Balun Ijuk, Merawang, Bangka Belitung

## Abstract

*Victim-offender mediation (VOM) is one of the penal mediation models used to settle the criminal cases. The origin of Victim-offender mediation was influenced by tribal moots model, uneficiency of criminal justice system, and restorative justice principles. Victim-offender mediation (VOM) is alternative dispute resolution with criminal case special, to see through criminal case between victim and crimnal actor. Victim-offender mediation tries to place offender and victim as a part of criminal justice system. Generally, Victim-offender mediation is dealing with the property offences, libel, offences against race, religion, and sexual harrasment. Victim-offender mediation also involves four fases of mediation, in take, confrontation, mediation its self, and outward. As the mediation model, Victim-offender mediation has the weaknesses and strenghs for offender, victim and society.*

*Key Word: Penal, Mediatiton, Criminal*

## I. PENDAHULUAN

Hingga saat ini proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia masih didominasi oleh kehadiran pengadilan negara dengan seperangkat hukum dan aparatnya. Hampir dapat dipastikan bahwa penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dianggap sebagai hal yang tabu bahkan "diharamkan" penerapannya. Hanya perkara perdata yang dapat diselesaikan di luar pengadilan baik melalui mediasi, rekonsiliasi maupun bentuk lain alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Padahal, proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan memiliki justifikasi teoritis yang kuat.

Hal ini terbukti dengan munculnya kajian akademik yang kemudian melahirkan model-model penyelesaian perkara pidana dengan seperangkat prinsip kerjanya. Proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ternyata juga mendatangkan

perubahan mendasar mengenai konflik antara korban dan pelaku dan hubungan antara keduanya. Dengan kata lain, mediasi yang selama ini dikenal di dalam perkara perdata juga sudah banyak digunakan sebagai alternatif atau model penyelesaian perkara pidana.

Salah satu model mediasi yang digunakan di banyak negara sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana (*penal mediation*) adalah *Victim Offender Mediation* (VOM). Sedangkan di Indonesia model VOM ini masih belum digunakan, karena memang penyelesaian perkara pidana masih mengharuskan kehadiran dan peran pengadilan untuk berpartisipasi di dalamnya. Dalam hubungan ini, uraian mengenai mediasi penal, konsep VOM, kelahiran, prinsip kerja, kelebihan dan kelemahannya penting dikemukakan sebagai bahan masukan agar bangunan hukum pidana Indonesia tidak kaku dan positivistik.



## II PEMBAHASAN

### Mediasi Penal dan Prinsip Kerjanya

Secara sederhana mediasi diartikan sebagai kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*) (Martin H. Manser, 1995:259). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'mediasi' diberi arti sebagai proses pengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988:569).

Pengertian mediasi menurut kamus mengandung tiga unsur penting, yaitu: *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih; *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan (Syahrizal Abbas, 2009:3).

Stuart M. Widman mendefinisikan mediasi sebagai *a process in which a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute*, suatu proses di mana seorang mediator memfasilitasi terjadinya komunikasi dan negosiasi antara para pihak agar tercapai kesepakatan mengenai sengketa yang mereka hadapi (Stuart M. Widman, 2006:161). Sedangkan Garry Goopaster (1993:201) mengartikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Pengertian mediasi yang dikemukakan oleh Garry Goopaster tidak hanya dalam

pengertian mediasi secara bahasa, tapi juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Ia juga menjelaskan bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak yang bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut.

Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak yang bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak (Syahrizal Abbas, 2009:5-6). Kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris "*Mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesai sengketa secara menengahi, yang menengahinya secara mediator atau orang yang menjadi penengah (Rahmadi Usman, 2003:23). Menurut Joni Emirzon (2001:46), bahwa unsur-unsur mediasi adalah:

1. Penyelesaian sengketa sukarela;
2. Intervensi atau bantuan;
3. Pihak ketiga tidak berpihak;
4. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus;
5. Partisipasi aktif.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur bahwa mediasi merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2). Menurut rumusan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator. Dalam PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 1 angka 6) disebutkan bahwa mediasi adalah penyelesaian melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.



Pasal 1 angka 5) PerMa menyebutkan pengertian mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Pasal 5 PerMA tersebut menyebutkan bahwa diakuinya proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi hanya terbatas pada perkara perdata, tidak sampai pada perkara pidana. Walaupun praktik mediasi sebenarnya tidak hanya dalam hukum perdata, tapi juga hukum pidana, hukum keluarga, hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan, dan bidang hukum yang lain (Rosanna Langer, 1998:169). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Menurut Gary Goodpaster sebagaimana telah dikutip Rachmadi Usman (2003: 103-104) menyatakan bahwa mediasi akan berfungsi dengan baik jika sesuai dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding;
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan;
3. Terhadap banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran;
4. Terdapat urgensi atau batas untuk penyelesaian;
5. Para pihak tidak memiliki musuh yang berlangsung lama dan mendalam;
6. Apabila para pihak mempunyai pendukung dan pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan;
7. Menetapkan presiden atau mempertahankan sesuatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak;
8. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku

lain, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi dalam hukum perdata berbeda dengan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi dalam hukum pidana, yaitu berkaitan dengan apa yang dipertaruhkan/ dipermasalahkan, siapa yang terlibat dan siapa yang menjadi mediator.

Dalam hukum perdata mediasi biasanya berkaitan dengan masalah uang, sedangkan dalam hukum pidana yang dipermasalahkan lebih banyak pada kebebasan dan kehidupan seseorang. Mengenai siapa yang terlibat dalam mediasi, dalam hukum perdata biasanya para pihak yang secara langsung bersengketa atau pihak kedua yang berkepentingan. Sedangkan dalam hukum pidana para pihak yang terlibat lebih kompleks tidak hanya pelaku dan korban, tapi juga jaksa penuntut umum, serta masyarakat luas.

Mediator dalam hukum perdata umumnya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan untuk itu, sedangkan dalam hukum pidana, mediator umumnya adalah hakim atau orang lain yang tidak memiliki pengalaman, pelatihan, bahkan pemahaman nyata mengenai praktik mediasi (Maureen E. Laflin, 2004:573).

Dalam hukum pidana mediasi berarti proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban (Mark William Bakker, 2007:64). Pertemuan itu diperantarai oleh seorang mediator atau lebih baik yang berasal dari penegak hukum, pemerintah, orang yang bergerak di bidang lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh masyarakat (Mark William Bakker, 2007:485).

Dipertemukannya pelaku dan korban kejahatan secara langsung mengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal



statis di dalam menyelesaikan sengketa dengan proses dan prosedur yang tetap (Jack B. Weinstein, 1996:292) ke arah hukum pidana yang humanistik, karena di dalam mediasi penal fokus utamanya bukan pada pembalasan terhadap tindakan pelaku, tapi pada upaya penyembuhan dan perdamaian. Pertemuan antara pelaku dan korban bertujuan untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian, baik yang dialami korban, lingkungan maupun masyarakat luas (Mary Ellen Reimund, 2003:22).

Dewasa ini penggunaan mediasi dalam sistem peradilan pidana tumbuh dan berkembang sangat pesat. Tidak sedikit para ahli hukum pidana yang menyerukan perlunya diadakan program-program yang bertujuan mempertemukan korban dan pelaku sehingga masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan baik dan situasi kembali berjalan dengan normal (Mark William Bakker, 2007:1480).

Seruan tersebut didasari oleh realitas bahwa sistem peradilan pidana yang diterapkan dewasa ini terlalu positivistik dan hanya bertujuan untuk memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukan, sehingga muncul ketidakpuasan dan ketidakadilan. Penentuan dilarangnya suatu perbuatan dan penjatuhannya pidana dianggap sebagai monopoli negara (Mark William Bakker, 2007:1480), dan oleh karenanya, korban tidak dapat menuntut agar pelaku dijatuhi pidana sesuai kehendaknya dan diminta bertanggungjawab atas kerugian yang diderita.

Selain itu, peradilan pidana sesungguhnya bukan merupakan institusi yang paling baik di dalam menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku. Hal demikian disebabkan oleh suatu konsepsi bahwa peradilan ternyata memiliki standar keadilan tersendiri terkait dengan pelaku kejahatan yang sama sekali tidak memperhatikan keinginan-keinginan korban (Adina Levine, 2004:118). Penyelesaian konflik juga akan merusak hubungan kekeluargaan antara korban dan

pelaku. Hubungan yang awalnya damai, tentram, harmonis dan bersifat kekeluargaan hancur dengan kehadiran sistem peradilan pidana (Jack B. Weinstein, 1996:294).

Atas dasar beberapa kelemahan sistem peradilan pidana tersebut, mereka kemudian mengusulkan agar proses penyelesaian konflik tidak hanya berada di tangan peradilan pidana tapi dengan mengefektifkan eksistensi mediasi penal (*penal mediation*), karena memiliki kelebihan yang tidak ditemukan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

*Pertama*, mediasi penal akan mengurangi perasaan balas dendam korban, lebih fleksibel karena tidak harus mengikuti prosedur dan proses sebagaimana dalam sistem peradilan pidana, dan lebih sedikit menghabiskan biaya, serta prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi (proses penyelesaian perkara di pengadilan) (Mark William Bakker, 2007:1480).

*Kedua*, beban sistem peradilan pidana karena menumpuknya perkara dan proses penyelesaiannya memakan waktu yang tidak sedikit banyak dapat dikurangi dengan kehadiran mediasi antara pelaku dan korban (Larysa Simms, 2007:801).

*Ketiga*, mediasi memberikan kesempatan kepada korban bertemu dengan pelaku untuk membahas kejahatan yang telah merugikan kehidupannya, mengungkapkan perhatian dan perasaannya serta meminta adanya restitusi (Mary Ellen Reimund, 2005:404).

*Keempat*, mediasi menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku. Kondisi ini tidak ditemukan di dalam penyelesaian konflik melalui sistem peradilan pidana. Pemberian maaf korban kepada pelaku akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan menciptakan rekonsiliasi antara keduanya (Jennifer Gerarda Brown, 1994:1277).

Secara teoritis paling tidak terdapat empat ide dan prinsip kerja mediasi penal. *Pertama*, tujuan diadakannya mediasi antara korban dan pelaku adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keduanya.



Konflik ini dalam sistem peradilan pidana dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut sehingga tidak jarang korban mengadakan mekanisme pembalasan sendiri kepada pelaku karena merasa tidak puas dengan keputusan sistem peradilan pidana. *Kedua*, mediasi penal berorientasi pada proses. Artinya, yang perlu diperhatikan adalah adanya kemauan dari korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.

*Ketiga*, mediasi biasanya dilaksanakan secara informal, tidak seperti proses peradilan pidana dengan prosedur dan prosesnya yang bersifat formal, kaku, dan sentralistik. *Keempat*, mediasi penal menghendaki adanya partisipasi aktif dan otonom dari korban dan pelaku kejahatan. Tanpa hal itu, akan dirasa sulit untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi (Barda Nawawi Arief, bahan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2007:22).

### **Mengenal Victim Offender Mediation**

*Victim-offender mediation (VOM)* merupakan salah satu model yang lazim dikenal dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan mediasi. Selain VOM terdapat model-model mediasi penal lain, yaitu *traditional village or tribal moots, informal mediation, reparation negotiation programs, community panels or courts, dan family and community group conferences* (Barda Nawawi Arief, bahan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2007:22). Model-model tersebut merupakan kerangka acuan di dalam menyelesaikan sengketa pidana, pilihan model tentu berpengaruh terhadap hasil mediasi yang dicapai dan dipengaruhi oleh faktor budaya, politik dan lain sebagainya.

Kemunculan model VOM ini selain karena dipengaruhi oleh *tribal moots*, juga disebabkan tidak efisiennya sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. Masyarakat tidak puas dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang hanya menekankan pada pemidanaan dan pembalasan (Ilyssa Wellikoff, 2004:2).

Penjatuhan pidana kepada pelaku jarang sekali yang memenuhi kebutuhan atau keinginan korban. Dalam bahasa yang berbeda, *inflicting punishment cannot restore ... the victims' losses, relieve their fears, help them make sense of their tragedy or heal their wounds* (Russell E. Farbiarz, 2008:361).

Selain itu, prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yang memfokuskan pada kebutuhan-kebutuhan korban dan menyediakan suatu forum di mana partisipasi korban merupakan hal yang esensial bagi tercapainya keadilan, memberikan pengaruh terhadap kemunculan model *victim-offender mediation (VOM)* (Ilyssa Wellikoff, 2004:4).

Keadilan restoratif bertolak dari tiga tujuan, yaitu: *Pertama*, keadilan restoratif memfokuskan diri pada keterlibatan korban dalam penyelesaian sengketa, dan memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan keadilan yang bersifat personal dan memuaskan. Dengan keterlibatan mereka, korban memiliki kesempatan untuk berhadapan langsung dengan pelaku, mengekspresikan kemarahan dan rasa frustrasi mereka, serta menjelaskan akibat langsung dari tindakan pelaku terhadap kehidupan mereka.

*Kedua*, keadilan restoratif mengakui bahwa tindakan pelaku berpengaruh secara langsung kepada masyarakat sehingga keterlibatan mereka dalam proses penyelesaian sengketa sangat penting. Pemberdayaan masyarakat dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting agar mereka juga memikirkan problem yang ditimbulkan pelaku. Di samping itu, masyarakat secara berkesinambungan mendapatkan pengalaman yang berarti mengenai keadilan dan dapat mengurangi tingkat kejahatan dalam bentuk pernyataan bahwa tindakan pelaku telah menyakiti orang lain. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses tersebut akan mengintegrasikan pelaku dan korban ke dalam sistem yang telah dibangun (Russell E. Farbiarz, 2008:363).



*Ketiga*, keadilan restoratif sama sekali tidak mengabaikan keberadaan pelaku, tetapi berusaha agar pelaku bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan. Keadilan restoratif mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya serta mau bertanggungjawab baik kepada korban maupun kepada masyarakat. Dengan pemikiran seperti ini, maka keadilan restoratif sesungguhnya tidak *victim-centered*, tapi juga memperhatikan pelaku dan masyarakat (Russell E. Farbiarz, 2008:363 ).

Secara historis, diperkenalkannya model VOM yang dipengaruhi oleh keadilan restoratif terjadi pada tahun 1974 di Kitchener, Ontario, Kanada. Pada waktu itu, dua orang pemuda melakukan kejahatan harta benda yang mengakibatkan timbulnya korban yang berjumlah dua puluh dua orang dan kerugian mencapai 2.200 dolar. Seorang pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*) mengusulkan kepada hakim agar pelaku dijatuhi hukuman berupa menemui korban dan membahas kerugian yang ditimbulkannya. Ternyata usul itu diterima oleh hakim. Para korban kemudian dihubungi dan dipertemukan dengan pelaku.

Dalam pertemuan itu akhirnya disepakati bahwa pelaku akan mengganti semua kerugian yang dialami korban. Kesepakatan tersebut ternyata dilaksanakan semuanya oleh pelaku dan dijadikan sebagai dasar keputusan hakim. Atas keberhasilan itu, di Kitchener dikembangkan program rekonsiliasi korban-pelaku kejahatan (*victim-offender reconciliation program*) (Sheila D. Porter dan David B. Ells, 1994:2523). Keberhasilan proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi, kemudian mengilhami diterapkannya mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa alternatif di beberapa negara. Saat ini terdapat 125 program mediasi pelaku-korban yang beroperasi di 34 negara. Program tersebut juga eksis di Australia, Belgia, Inggris, Skotlandia, Perancis, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Afrika Selatan (Sheila D. Porter dan David B. Ells, 1994:2521).

Fokus utama *Victim-Offender Mediation* adalah menempatkan pelaku dan korban kejahatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Korban diberi hak untuk bertanya kepada pelaku mengapa dia menjadi korban, tujuannya adalah agar pelaku bertanggungjawab atas tindakannya (Ilyssa Wellikoff, 2004:2).

Pelaku juga diminta bertanggungjawab atas tindakannya yang merugikan korban. Selain itu, konflik antara keduanya dapat diselesaikan dengan hasil yang sama-sama diterima oleh kedua belah pihak. Semua itu dapat terwujud jika permintaan dijadikan sebagai basis utama, artinya, di satu sisi pelaku mengakui bahwa tindakannya yang merugikan korban merupakan perbuatan yang salah, meminta maaf kepada korban serta siap bertanggungjawab atas semua kerugian yang dialami korban, sedangkan pada sisi yang lain, korban menerima permintaan maaf pelaku. Permaafan mensyaratkan adanya kemauan seseorang untuk menerima hak orang lain untuk memarahi, mendapatkan penilaian negatif dan perilaku tidak berkenan yang disebabkan oleh ketidakadilannya pada orang itu (Maureen E. Laflin, 2004:581).

*Victim Offender Mediation* umumnya diterapkan pada tindak pidana seperti tindak pidana harta benda, tindak pidana penghinaan, pelukaan ringan, penghinaan atas dasar ras, agama, dan pelecehan seksual. Bahkan, saat ini VOM cenderung diterapkan pada tindak pidana yang menimbulkan luka dan kerugian yang besar pada korban (Alyssa H. Shenk, 2001:194-209).

Model *victim-offender mediation* di dalamnya masih terdapat tiga model. Artinya, VOM, sebagai salah satu model penyelesaian perkara pidana berdasarkan mediasi, ternyata memiliki tiga model yang berbeda, yaitu *the church-based model*, *community-based models*, dan *system-based models*, yang pertama memiliki sukarelawan yang dijadikan sebagai mediator dan dibangun berdasarkan konstruksi berpikir Bibel, yaitu pemulihan, rekonsiliasi dan pemaafan.



Dalam melaksanakan mediasi gereja mendapat penyerahan perkara dari sistem peradilan pidana. Sedangkan yang kedua dijalankan oleh organisasi swadaya masyarakat *non-profit* yang merekrut dan melatih masyarakat sebagai mediator. Mereka juga mendapat penyerahan perkara dari sistem peradilan pidana. Fokus utama model ini adalah pada pemulihan kembali hubungan kekeluargaan dan kedamaian masyarakat. Adapun pelaksanaan model yang ketiga berada di dalam sistem peradilan pidana dan kebanyakan berada di unit penuntutan, unit kenakalan remaja dan bagian pengawasan. Tujuan utamanya adalah menentukan waktu pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban. Penyerahan perkara dibatasi hanya pada klien yang ditangani langsung oleh unit tersebut (Sheila D. Porter & David B. Ells, 1994:2252).

Terlepas dari tiga model yang terdapat dalam VOM, secara umum terdapat empat tahap atau fase dalam model VOM. *Pertama* adalah fase masukan (*in take*). Pada fase ini mediator mempelajari konflik dari para pihak dan harus menentukan apakah pelanggaran yang para pihak memang dapat diadakan mediasi.

Mediator menyatakan bahwa konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mediasi ketika korban ketakutan berbicara langsung kepada pelaku, merasa tersakiti jika berkomunikasi dengan pelaku dan pelaku tidak mau mengakui keterlibatannya dalam konflik atau perbuatan tersebut. Mediator juga memastikan keamanan fisik dan emosi korban tetap terjaga, sehingga jika hal itu tidak terpenuhi, maka mediator harus menolak menyelesaikan konflik tersebut dengan mediasi untuk mencegah terjadinya reviktimisasi (Russell E. Farbiarz, 2008:366).

*Kedua* adalah fase persiapan konfrontasi (*confrontation*). Konfrontasi dilaksanakan dengan beberapa cara, tergantung apakah akan digunakan *social work case development model* atau *pure mediation model*.

Model pertama mengakui bahwa banyak orang yang dipersiapkan atas konfrontasi korban pelaku dan mediator harus membantu para pihak di dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka.

Mediator akan menemui para pihak sebelum sesi mediasi dilaksanakan untuk merekomendasikan bantuan profesional dan membantu mereka mengidentifikasi tujuan dan kontribusi mereka dalam proses mediasi. Sebaliknya, model mediasi murni menolak ide bahwa mediator harus menemui para pihak sebelum proses mediasi dilaksanakan karena kegiatan itu akan menimbulkan hubungan yang kurang baik antara mediator dengan para pihak. Model ini malah menyarankan mediator untuk menghubungi para pihak melalui telepon atau surat yang dikirim melalui pos (Alyssa H. Shenk, 2001:194-195).

Ketiga adalah fase mediasi itu sendiri (*mediation its self*), pada fase ini mediasi lebih difokuskan pada dialog daripada pemenuhan kesepakatan pemberian restitusi, memunculkan rasa empati dan pemahaman antara korban dan pelaku. Fase ini dimulai dengan aturan main yang harus diikuti kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada korban untuk menceritakan kejahatan yang menimpanya. Setelah itu, pelaku juga diberi kesempatan untuk merespon keluhan-keluhan korban, menjelaskan mengapa kejahatan itu terjadi serta meminta maaf. Pembicaraan mengenai kerugian korban, kesepakatan reparasi yang memuaskan kedua belah pihak merupakan langkah berikutnya yang harus dijalankan oleh mediator (Alyssa H. Shenk, 2001:194-195).

Terakhir dari proses mediasi adalah fase pelaksanaan hasil kesepakatan (*outward*). Pada fase ini jika perjanjian telah disepakati kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, pelaku kejahatan dipantau untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan tanpa pengurangan sedikit pun. Pelaku harus dipastikan bahwa dia mematuhi perjanjian yang telah disepakatinya dengan korban (Russell E. Farbiarz, 2008:367).



### **Kelebihan dan Kelemahan *Victim Offender Mediation***

Model VOM dengan empat tahap atau fase pelaksanaannya tersebut memiliki kelebihan tidak hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku dan masyarakat. Bagi korban model VOM menyembuhkan baik secara emosi maupun psikis melalui pertemuan dan komunikasi dengan pelaku. Korban juga berhak menuntut restitusi kepada pelaku, walaupun hal itu bukan merupakan tujuan utama model ini. Selain itu, korban juga diuntungkan dengan proses itu karena dapat memaafkan tindakan pelaku (Ilyssa Wellikoff, 2004:7-8).

Bagi pelaku model VOM memberikan kelebihan, setidaknya dia mengakui bahwa kejujuran dan keadilan dalam proses mediasi memberikan respon positif baginya, sehingga pelaku merasa memiliki hubungan yang dekat dengan korban. Dalam konteks ini pengakuan bersalah atas tindakannya terdahulu menjadi hal yang mudah terjadi, karena kemauan korban untuk mendengarkan penjelasannya atas tindakannya itu sudah merupakan hal yang positif baginya. Akhirnya, eksistensi pelaku tetap dihormati oleh korban. Semua itu tidak ditemukan di dalam sistem peradilan pidana (Katherine L. Joseph, 1996:212-213).

Model VOM juga mendatangkan kelebihan (manfaat) bagi masyarakat karena mereka dilibatkan secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa. Hal demikian berbeda sama sekali dengan sistem peradilan pidana yang sejak awal menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang pada dasarnya merupakan kejahatan melawan masyarakat sehingga negara, bukan korban dan masyarakat, yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Program VOM yang memasukkan para sukarelawan sebagai mediator meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana. Mediasi yang menghasilkan kesepakatan berupa kerja sosial bagi pelaku secara langsung menguntungkan masyarakat (Katherine L. Joseph, 1996:212-213).

Semua keuntungan atau kelebihan pada model *Victim-Offender Mediation* pada dasarnya mengarah pada efek sistem peradilan pidana yang lebih humanis yang memperhatikan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat (Ilyssa Wellikoff, 2004:5). Selama ini sistem peradilan pidana kurang memperhatikan eksistensi korban dan masyarakat serta lebih memfokuskan diri pada penjatuhan hukuman kepada pelaku sehingga konflik yang terjadi tetap tidak dapat diselesaikan dan berlanjut secara berkesinambungan.

Di samping kelebihan tersebut, VOM ternyata juga memiliki kelemahan sehingga banyak kritik yang ditujukan kepadanya. *Pertama*, tidak adanya atau kurangnya panduan yang sesuai untuk memastikan bahwa proses mediasi penal berjalan secara efektif dan memenuhi prinsip-prinsip etis. Misalnya, kritik terhadap kurangnya pelatihan formal kepada mediator dalam praktik mediasi antara pelaku dan korban.

Kegagalan untuk memberikan pelatihan yang memadai akan menyebabkan tidak jelasnya tujuan yang hendak dicapai dalam mediasi, penunjukan mediator yang tidak sesuai dan kondisi para pihak yang tidak senang dengan kehadirannya. *Kedua*, perlindungan yang kurang memadai kepada korban merupakan kelemahan lain model mediasi berdasarkan model VOM. Pada masa lalu, tidak sedikit korban mengalami reviktimisasi (*revictimization*) ketika dihadapkan secara langsung dengan pelaku kejahatan.

Mereka memiliki sensitifitas dan pemahaman yang tinggi ketika harus dihadapkan dengan pelaku. *Ketiga*, kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban menjadikan proses mediasi tidak berlangsung dengan baik dan malah mengarah kepada kecenderungan yang tidak efektif. Mediasi hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika kedua belah pihak memiliki kedudukan yang seimbang (Ilyssa Wellikoff, 2004:9).



### III PENUTUP

Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan antara korban dengan pelaku kejahatan guna menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Pertemuan tersebut telah mengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini positivistik ke arah hukum pidana yang humanistik. Penggunaan mediasi penal sebagai salah satu penyelesaian perkara pidana paling tidak akan mengurangi beban sistem peradilan pidana, mengurangi perasaan balas dendam korban kepada pelaku, dan menciptakan kembali hubungan yang harmonis di antara keduanya.

Salah satu model mediasi penal adalah *victim offender mediation* (VOM). Titik tekan VOM adalah pada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku kejahatan dan menempatkan keduanya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Pelaku dan korban sama-sama diberikan hak dan kewajiban agar konflik yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan keputusan yang memuaskan sehingga situasi kembali berjalan secara harmonis. Di dalam VOM terdapat empat fase pelaksanaan mediasi, yaitu fase masukan (*in take*), konfrontasi (*confrontation*), mediasi (*mediation its self*), dan pelaksanaan hasil kesepakatan (*outward*). Sebagai model mediasi penal VOM juga memiliki kelebihan dan kelemahan baik bagi korban, pelaku, masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adina Levine, "A Dark State of Criminal Affairs: ADR Can Restore Justice to the Criminal "Justice" System", *Hamline Journal of Public Law and Policy*, 2003
- Alyssa H. Shenk, "Victim-Offender Mediation: The Road To Repairing Hate Crime Injustice", *Ohio State Journal on Dispute Resolution* No. 17, 2001
- Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Jakarta, 27 Maret 2007
- Gabriel H. Teninbaum, "Easing The Burden: Mediating Misdemeanor Criminal Matters", *Dispute Resolution Journal*, No. 62, 2007
- Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta, 1993
- Gunawan W, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali, Jakarta, 2001.
- Ilyssa Wellikoff, "Victim-Offender Mediation and Violent Crimes: On the Way to Justice", *Cardozo Online Journal of Conflict Resolution*, No. 5, 2004
- Jack B. Weinstein, "Some Benefit and Risks of Privatization of Justice Though ADR", *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, 1996
- Joni Emirzone, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Jennifer Gerarda Brown, "The Use of Mediation to Resolve Criminal Cases: A Prosedural Critique", *Emory Law Journal*, No. 43, 1994.
- Katherine L. Joseph, "Victim-Offender Mediation: What Social & Political Factors Will Affect Its Development?", *Ohio State Journal on Dispute Resolution* No. 11, 1996
- Larysa Simms, "Criminal Mediation is The Base of the Criminal Justice System: Not Replacing Traditional Criminal Adjudication, Just Making it Better", *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, No. 22, 2007



- Mark William Bakker, "Repairing The Breach and Reconciling the Discordant: Mediation in the Criminal Justice System", North Carolina Law Review, No. 72, 1994
- Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New Edition, Oxford University Press, Oxford, 1995
- Mary Ellen Reimund, "Confidentiality in Victim-Offender Mediation: A False Promise?", Journal of Dispute Resolution, 2005
- , "Mediation in Criminal Justice: A Restorative Approach", Advocate, No. 46, 2003
- Maureen E. Laflin, "Remarks On Case-Management Criminal Mediation", Idaho Law Review, No. 40, 2004
- Nancy A. Welsh, "The Place of Court-Connected Mediation In A Democratic Justice System", Cardozo Journal of Conflict Resolution, No. 5, 2004
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Rosanna Langer, "The Juridification and Technicisation of Alternative Dispute Resolution Practices", Canadian Journal of Law and Society, 1998
- Russell E. Farbiarz, "Victim-Offender Mediation: A New Way of Disciplining America's Doctors", Michigan State University Journal of Medicine & Law, No.12, 2008
- Sheila D.Porter & David B. Ells, "Mediation Meets the Criminal Justice System", Colorado Lawyer Criminal Law Newsletter, No. 23, 1994
- Stuart M. Widman, "The Protections and Limits of Confidentiality in Mediation", Alternatives to the High Cost of Litigation, November, 2006
- Suyud Margono, *Mempertimbangkan ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cetk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2009
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan